



# LATAR BELAKANG IMPLEMENTASI BENTURAN KEPENTINGAN DI KEMKOMINFO

1. Amanat Peraturan Per-UU-an
2. Agenda Reformasi Birokrasi
3. Kode Etik Kominfo
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

# DEFINISI BENTURAN KEPENTINGAN

Situasi dimana pegawai memiliki / patut diduga memiliki **kepentingan pribadi** terhadap setiap penggunaan **wewenang** sehingga dapat mempengaruhi kualitas **keputusan &/ tindakannya**.

## KEPENTINGAN ORGANISASI

SOTK 6/2018: perumusan, pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimtek, supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah.

VS

## KEPENTINGAN PRIBADI

Keinginan/kebutuhan Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

# *Case Studies*

## BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pemilihan Lokasi Perjadin → Termasuk Benturan Kepentingan atau tidak?
2. <https://tirto.id/konflik-kepentingan-dan-kritik-kpk-soal-rangkap-jabatan-di-bumn-dxJi> (Pejabat/ Pegawai K/L merangkap sebagai Komisaris BUMN)



## **BOLEH / TIDAK ?**

Apa yang harus dilakukan:

1. Rangkap Jabatan dipertahankan ? atau
2. Melepaskan salah satu jabatannya, paling ideal?

Indikator Penilaian Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan: → Belum diatur

Semua keputusan/tindakan dari pegawai Setjen telah dilakukan untuk kepentingan Kemkominfo

Pemetaan  
BK

Jumlah  
Peserta  
Sosialisa  
si

Pemahaman  
Pegawai ttg  
penanganan  
BK  
(Internalisasi)

Laporan  
Monev  
Penanganan  
BK

Nilai Hasil  
Survey  
Integritas/  
Korupsi

Jumlah  
Dumas/  
WBS  
terkait BK

## Faktor Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan: →Lingkup Evaluasi

1. Komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. Partisipasi dan keterlibatan Pegawai;
3. Perhatian khusus pada hal tertentu: (bahan pemetaan benturan kepentingan)
  - a. hubungan afiliasi (pribadi/golongan);
  - b. Gratifikasi;
  - c. pekerjaan tambahan;
  - d. informasi orang dalam;
  - e. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
  - g. kedudukan di organisasi lain;
  - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan/atau
  - i. perangkapan jabatan.
4. Langkah-langkah preventif dalam menghindari situasi Benturan Kepentingan:
  - a. sosialisasi atau internalisasi pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan;
  - b. pemutakhiran kode etik;
  - c. pemutakhiran Standard Operational Procedure (SOP).
5. Penegakkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

- *Whistleblowing System* adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap pegawai untuk melaporkan adanya Pelanggaran yang kerahasiaan identitas Pelapor dijamin serta diberikan perlindungan oleh pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Pelapor (*Whistleblower*) adalah pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melaporkan adanya Pelanggaran.

# WBS PADA PORTAL KOMINFO

## Aplikasi Intranet



e-Mail



e-audit



e-presensi



sidara



LPSE



simaya



klinik



KMS



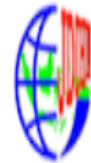
k-cloud



pinjam ruangan



simpatik



JDIH



e-SKP



ManajemenRisiko



ebrary



Whistleblower



Perihal Pengaduan \*

Pejabat/Pegawai yang Diduga Terlibat \*

Waktu Perkiraan Kejadian \*

Dimana Lokasi Kejadian \*

Unit Utama \*

Uraian Pengaduan \*

Bukti Pendukung \* (jpg, pdf, mp4)

 No file chosen

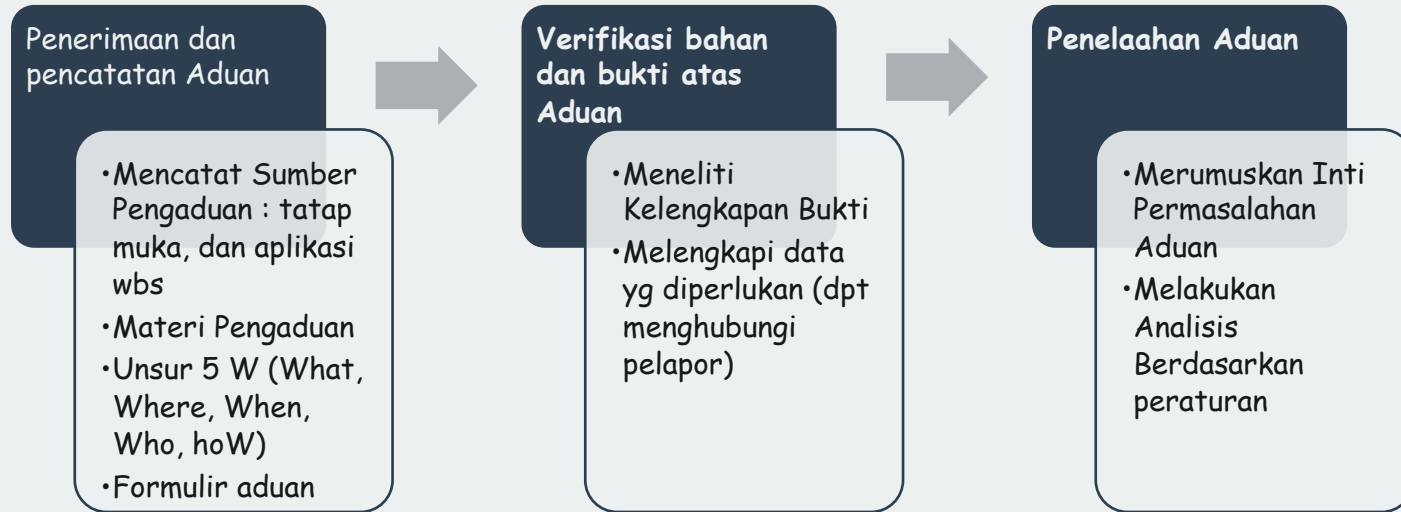
Email \*

Gunakan email samaran yang tidak mencerminkan identitas anda,  
Email ini Untuk Update Status Laporan Anda

Note : pelaporan pelanggaran dilengkapi dengan bukti yang memadai untuk dapat di tindaklanjuti.

Submit

# PROSES BISNIS PENGELOLAAN WBS OLEH ITJEN



Proses Tindak Lanjut (Pemeriksaan/ Audit)

# PROSES BISNIS WBS LANJUTAN

IR & Irjen

- Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi
- Melaporkan dan menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan Sekretaris Itjen dan tim TP3

Ses Itjen

- Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan secara periodik kepada Inspektur Jenderal
- Melakukan fasilitasi pengarsipan dan dukungan pengelolaan aduan secara elektronik
- Melakukan koordinasi dengan PPID/Biro Humas terkait permintaan informasi dari public.

Satker,  
Irjen dan  
Menteri

- Menerima laporan aduan dan hasil tindak lanjut atas aduan

**TERIMA KASIH**